

Capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021
Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020 – 2022

Terlaksananya Pelibatan Masyarakat Yang Bermakna Dalam Penyusunan Kajian Substansi, Naskah Akademik Dan RUU KKR.

1. Berkaitan dengan substansi draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (NA RUU KKR), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia hingga saat ini telah menyampaikan bahan tersebut kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku pemegang tugas fungsi penyelarasan Naskah Akademik, dan nantinya akan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk dilakukan penyelarasan bersama dengan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR), yang nantinya akan dilakukan pembahasan Pertemuan Antar Kementerian (PAK) untuk kemudian mendapat ijin prakarsa diajukan pada DPR pada program legislasi Daftar Kumulatif Terbuka, sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Konsinyering di Hotel Aston Sentul pada tanggal 14-16 September 2020 bersama Kepala BPHN sebagai narasumber dengan menyatakan bahwa kata pelaku tidak perlu dimuat pada rancangan kebijakan.
 - b. Konsinyering dari BPHN pada tanggal 24 September 2020 bersama narasumber akademisi Prof Satya Arinanto di Bogor
 - c. Kegiatan pembahasan Rancangan NA RUU KKR dengan Dirjen HAM, Direktorat Yankomas, Direktorat Instrumen HAM pada tanggal 15 Maret 2021 di ruang rapat Direktur Jenderal HAM.
 - d. Pertemuan antara Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal HAM dengan Kepala BPHN dan jajaran pada tanggal 14 April 2021 membahas mengenai penyempurnaan NA RUU KKR di BPHN.
 - e. Kegiatan rapat antara Direktorat Instrumen HAM dengan BPHN pada tanggal 1 Juli 2021 terkait pembahasan mengenai masukan dari BPHN terhadap Rancangan NA RUU KKR secara virtual.
2. Dalam rangka melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan substansi draft NA RUU KKR dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kebijakan di Pusat Terkait Penyusunan Substansi Draft NA RUU KKR pada tanggal 16 – 18 Maret 2021 di Hotel JS Luwansa. Pada kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kebijakan di Pusat, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia telah mengundang Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai peserta, akan tetapi tidak terdapat perwakilan ELSAM yang menghadiri kegiatan tersebut.
 - b. Kegiatan Rapat Tim Perumusan Kebijakan terkait *Grand Design* Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal HAM dengan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi I dimulai pada pukul 08.00 – 12.00 dan sesi II dimulai pada pukul 13.00 – 16.30. Adapun kegiatan Rapat Tim

Perumusan Kebijakan mengundang 4 (empat) narasumber, dimana salah satu diantaranya merupakan unsur dari masyarakat, yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Professor Harkristuti Harkrisnowo.

- c. Kegiatan Rapat Tim Perumusan Kebijakan terkait *Grand Design* Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2021 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal HAM. Adapun kegiatan Rapat Tim Perumusan Kebijakan mengundang 2 (dua) narasumber, dimana salah satu diantaranya merupakan unsur dari masyarakat, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Professor Jimly Asshiddiqie.
 - d. Kegiatan Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat secara Non-Yudisial dilaksanakan pada 9 – 11 Juni 2021 di JHL Solitaire. Adapun kegiatan Rapat Perumusan Kebijakan mengundang 5 (lima) narasumber, dimana salah satu diantaranya merupakan unsur dari masyarakat, yakni Professor Asvi Warman Adam.
3. Selain itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia beserta jajaran telah menerima audiensi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada tanggal 1 Juli 2021 yang dilaksanakan secara daring dalam rangka membahas upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat secara non yudisial, termasuk pembahasan RUU KKR. Adapun audiensi tersebut juga dihadiri oleh korban / keluarga korban dari peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Lampiran
Foto Pelaksanaan Kegiatan

Foto 1 Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kebijakan di Pusat (Hotel J.S. Luwansa, 16-18 Maret 2021)



Foto 2 Rapat Tim Perumusan Kebijakan PHB (7Juni 2021)



Foto 3 Rapat Tim Perumusan Kebijakan PHB (8 Juni 2021)



Foto 4 Rapat Perumusan Kebijakan Penanganan Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial (Hotel JHL Solitaire, Tangerang, 9-11 Juni 2021)



*Foto 5 Rapat Audiensi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Audiensi dilaksanakan secara daring/virtual pada 1 Juli 2021)*



Dokumen Kegiatan

Dokumen 1 Surat Undangan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kebijakan di Pusat kepada Direktur Elsam



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 2521344, 2525045 Faksimili (021) 2525045
Laman: www.ham.go.id Email: yankomas@ham.go.id

Nomor : HAM-HA.01.06-17 12 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Peserta Konsinyering Pembahasan Draft Kebijakan
Penyusunan Substansi Naskah Akademik RUU tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Yth. Peserta Konsinyering
(Daftar Terlampir)
di

Tempat

Direktorat Jenderal HAM sedang menyusun substansi draft naskah akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap substansi draft Naskah Akademik dimaksud, pada:

Hari / tanggal : Selasa - Kamis, 16-18 Maret 2021
Tempat : Hotel JS Luwansa, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Selanjutnya, terkait dengan kegiatan tersebut, diharapkan Saudara untuk mengirimkan Surat Perintah dan Lembar Konfirmasi (*terlampir*) ke email yankomas@ham.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami melalui email di atas atau narahubung **Bagas: 085643543047**.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal HAM

Muallimin Abdi
NIP 196211211982031001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Lampiran I :
Nomor : HAM-HA.01.06-17
Tanggal : 12 Maret 2021

**DAFTAR PESERTA KONSINYERING
PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK RUU KKR
SELASA - KAMIS, 16-18 MARET 2021**

1. Deputi V Kantor Staf Presiden (atau yang mewakili);
2. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
3. Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM;
5. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan;
6. Direktur Hukum dan Regulasi, Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
8. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat;
10. Kepala Bidang Perlindungan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan;
11. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabinet;
12. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah IV;
13. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah I;
14. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah II;
15. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah III;
16. Kepala Subbidang Pengembangan dan Promosi HAM, Sekretariat Kabinet;
17. Kepala Sub Direktorat Instrumen Hak Sipil Dan Politik;
18. Kepala Seksi Penyiapan Instrumen Hak Sipil Dan Politik;
19. Kepala Seksi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Pelayanan Komunikasi Masyarakat Wilayah IV.